

Hubungan dan pemikiran para perwira Batak pada masa Revolusi hingga Liberal tahun 1945—1959

Rafida Dwikaneta¹, Humaidi, M.Hum², Sri Martini, SS. M.Hum³

¹ Universitas Negeri Jakarta, Jl. R. Mangun Muka Raya No.11 Jakarta Timur, 13220, rafida.dwikaneta@gmail.com, 085775927409

² Universitas Negeri Jakarta, Jl. R. Mangun Muka Raya No.11 Jakarta Timur, 13220, humaidiunj@gmail.com

³ Universitas Negeri Jakarta, Jl. R. Mangun Muka Raya No.11 Jakarta Timur, 13220, srimartini7271@gmail.com

Abstract

This research uses historical method with descriptive-narrative approach and aim to describe the history of the relationship between Batak officers in the Indonesian military during the Revolution to the Liberals in 1945—1959. The results showed that Batak officers were involved in many conflicts, especially in the 1950s, which Ulf Sundhaussen called the Trial and Trial Era. The conflict between the Batak officers involved various events, including the ReRa Hatta incident, the 17 October 1952 incident, Nasution became the Army Chief of Staff for the second time, the Lubis incident, and finally the PRRI rebellion. Differences in educational and religious backgrounds did not really matter to the Batak officers at that time. That means, the Batak officers at that time showed that they prioritized their idealism over their fellow tribesmen. In fact, Batak customs are closely related to the family contained. However, many Batak officers who became leaders in the Army showed that they had a work ethic and morals, in accordance with traditions.

Keywords

Military; Batak; Revolution; Liberal.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif-naratif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah hubungan dan pemikiran para perwira Batak dalam militer Indonesia pada masa Revolusi hingga Liberal tahun 1945—1959. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perwira Batak banyak terlibat konflik, terutama pada tahun 1950-an, yang disebut Ulf Sundhaussen sebagai Era Coba-Coba. Konflik para perwira Batak ini meliputi berbagai peristiwa, antara lain ReRa Hatta, Peristiwa 17 Oktober 1952, Nasution menjadi KSAD kedua kalinya, Peristiwa Lubis, hingga puncaknya pada pemberontakan PRRI. Perbedaan latar belakang pendidikan maupun agama tidak terlalu menjadi masalah bagi para perwira Batak masa itu. Itu artinya, perwira Batak masa itu menunjukkan mengutamakan idealismenya dibandingkan kekerabatan sesama sukunya. Padahal, adat Batak terkenal dengan kekeluargaan yang erat. Bagaimanapun, perwira Batak banyak yang menjadi pemimpin dalam Angkatan Darat menunjukkan bahwa mereka memiliki etos kerja dan moral, sesuai dengan ajaran adatnya.

Kata kunci

Militer; Batak; Revolusi; Liberal.

**Received: 9 October 2022*

**Revised: 14 January 2023*

**Accepted: 30 January 2023*

**Published: 31 January 2023*

PENDAHULUAN

Sejak masa kolonial Belanda, Pulau Jawa dijadikan pusat administrasi pemerintah Hindia Belanda. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Jawa diutamakan untuk kerja sama di bidang politik dengan tokoh-tokoh pergerakan, sementara di Sumatra dijadikan pemasok bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perang Jepang (Zed, 2005). Dengan demikian, setelah merdeka, Pulau Jawa pun tetap menjadi pusat pemerintahan.

Sebagai pusat pemerintahan, pemerintah lebih fokus pada pembangunan Pulau Jawa. Setidaknya, begitulah menurut para pemberontak pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang kebanyakan berasal dari luar Jawa. Para pemberontak ini merasa pemerintah pusat mengabaikan daerah-daerah luar Pulau Jawa. Hal inilah yang memicu konflik antara daerah dengan pusat, sehingga memunculkan pemberontakan di daerah-daerah. Seperti di Sumatra, pernah terjadi pergolakan akibat Negara Sumatra Timur, pemberontakan DI/TII di Aceh, dan mencapai puncaknya pada pemberontakan PRRI.

Pemberontakan PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi dikatakan Elson sebagai tantangan daerah paling serius yang pernah dihadapi Indonesia, bahkan dapat dikatakan hampir pecah. Pada pemberontakan PRRI, Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon sebagai perwira Batak turut serta dalam pemberontakan ini karena khawatir komunis akan melebarkan sayapnya. Akan tetapi, A.H. Nasution yang juga tidak suka dengan keberadaan komunis, tidak merasa harus ikut serta dalam pemberontakan tersebut.

Berdasarkan latar belakangnya, para perwira Batak ini memang mendapatkan pendidikan militer berbeda. T.B. Simatupang dan A.H. Nasution adalah bekas tentara *Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger* (KNIL) dari Belanda, sedangkan Zulkifli Lubis adalah bekas tentara Pembela Tanah Air (PETA) dari Jepang, dan Maludin Simbolon bekas tentara *Giyugun*. Hal itu juga yang menjadi salah satu faktor perbedaan pandangan antara para perwira ini. Perbedaan latar pendidikan militer yang didapat oleh para perwira memang sering menjadi faktor terjadinya konflik internal dalam tubuh militer pada tahun 1950-an (Sundhaussen, 1986). Para perwira Indonesia masa itu mendapat pendidikan dari negara yang menjajahnya, yakni Belanda dan Jepang. Perbedaan dua budaya negara penjajah Indonesia ini pun menciptakan gaya yang berbeda.

Penyebab konflik internal lainnya adalah terkait suku, antara suku Jawa dan suku non-Jawa. Mundurnya Hatta asal Minangkabau dari kursi Wakil Presiden menunjukkan kurangnya perwakilan dari daerah luar Jawa dalam pemerintah pusat. Kesukuan ini juga ditemukan dalam militer. Zulkifli Lubis dipertimbangkan menduduki

jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat karena saat itu tidak ada lagi perwakilan dari Sumatra atau luar Pulau Jawa yang memegang jabatan dalam TNI. Sebelumnya, A.H. Nasution menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, dan T.B. Simatupang menjabat Kepala Staf Angkatan Perang, kemudian keduanya dipecat, bahkan jabatan Kepala Staf Angkatan Perang dihapuskan akibat Peristiwa 17 Oktober 1952.

Uraian tersebut pun menjadi sedikit bukti bahwa para perwira Batak, walau satu suku, tidak selalu memiliki hubungan yang harmonis. Walaupun demikian, peran mereka dalam kemiliteran juga sangat berarti. A.H. Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menciptakan buku tentang sejarah militer Indonesia, bahkan dirinya tetap berkecimpung di militer pada masa Orde Baru. T.B. Simatupang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dan menciptakan buku tentang sejarah militer. Sementara itu, Zulkifli Lubis dikenal sebagai Bapak Intelijen Indonesia yang meletakkan dasar-dasar intelijen di Indonesia yang didapatnya dari perwira-perwira Jepang dan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat mendampingi A.H. Nasution.

Dengan demikian, walaupun daerah Sumatra (tepatnya tempat tokoh-tokoh bersuku Batak) sering mengalami pergolakan, banyak tokoh-tokoh militernya yang memiliki peran penting untuk militer Indonesia. Apalagi, sifat khas suku Batak yang keras atau tegas sangat sesuai dengan kehidupan militer yang keras pula. Dominasi suku Jawa dalam politik maupun militer memang nyata adanya, bahkan hingga sekarang. Banyak masyarakat yang lebih mengenal tokoh-tokoh militer yang berasal dari Jawa daripada luar Jawa. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti perwira Batak masa kepemimpinan Soekarno. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait perjalanan perwira Batak dalam militer Indonesia dari masa Revolusi hingga Liberal. Orang Batak dikenal sangat erat kekeluargaannya. Namun, para perwira Batak ini tidak selalu satu pandangan terkait kemiliteran, bahkan cenderung berkonflik, sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik mengkajinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dalam bentuk deskriptif-naratif. Berdasarkan kaidah dalam penelitian sejarah, langkah penulisan sejarah adalah: 1) pemilihan topik, peneliti memilih topik perwira Batak karena masih sedikit sejarah hubungan para perwira dari luar Jawa; 2) heuristik, mengumpulkan sumber-sumber terkait dengan topik penelitian yang didapat dari Perpustakaan Nasional RI, iPusnas, Pusat Sejarah TNI, dan Google Scholar, antara lain *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1* dan *Peristiwa 17 Oktober 1952* karya A.H. Nasution; *Laporan dari Banaran dan Pelopor dalam Perang-Pelopor dalam Damai* karya T.B Simatupang; *Kolonel Misterius di Balik Pergolakan TNI AD* karya Peter Kasenda, dan lain sebagainya; 3) verifikasi, melakukan kritik sumber terkait keaslian sumber-sumber, yang terdiri dari autentisitas atau kritik ekstern yang terkait fisik sumber, dan kredibilitas atau kritik intern yang terkait isi dari sumber; (4) interpretasi, menafsirkan terkait fakta-

fakta sejarah yang telah ditemukan dan memungkinkan adanya subjektivitas, sehingga perlu mengikuti kaidah keilmuan agar subjektivitas dapat seminimal mungkin; dan 5) historiografi, melakukan penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan militer di Tanah Batak

Ketika para Zending datang ke Tanah Batak, masyarakat Batak mulai mengenal pendidikan sehingga masyarakat Batak sudah tidak lagi menjadi suku yang tertutup. Selain itu, suku Batak juga mulai mengenal perantauan, dan banyak masyarakat yang semangat mengirimkan anaknya ke sekolah, hingga ke luar Tanah Batak. Apalagi, pada tahun 1900-an, atau pasca Perang Batak, mulai banyak yang ke Sumatra Timur maupun Pulau Jawa. Di sana, masyarakat Batak meneruskan pendidikan umumnya, bahkan ada yang mengikuti pendidikan militer, yaitu *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL). Masyarakat Batak yang berhasil menjadi bagian dari tentara Hindia Belanda adalah T.B. Simatupang dan A.H. Nasution. Keduanya termasuk perwira pribumi yang paling menonjol di kesatuan KNIL itu. Ketika Indonesia merdeka, A.H. Nasution dan T.B. Simatupang sangat berjasa dalam kemiliteran Indonesia.

Tentara Hindia Belanda (KNIL) bertugas untuk mengamankan kondisi dari berbagai pemberontakan pribumi terhadap pemerintah kolonial, seperti Perang Padri, Perang Aceh, dan lain sebagainya. Ketika Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia, KNIL juga bertugas untuk menghalanginya, dan A.H. Nasution turut serta dalam perang dengan Jepang ini. Bagaimanapun, Jepang yang saat itu dikuasai oleh rezim militer, berhasil menduduki seluruh wilayah Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Sebagai rezim militer, Jepang pun membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah militer yang masing-masing wilayahnya dipimpin oleh tentara Jepang yang berbeda. Akibat perbedaan pemimpin di tiga wilayah tersebut, pembentukan tentara pun memiliki perbedaan. Di Jawa, terdapat organisasi Pembela Tanah Air (PETA), sementara di Sumatra lebih dikenal dengan sebutan *Giyugun*. Pusat pelatihan *Giyugun* di Sumatra terbagi dalam empat wilayah, yaitu *Giyugun Aceh*, *Giyugun Sumatra Timur*, *Giyugun Sumatra Barat*, dan *Giyugun Sumatra Selatan*. Calon perwira asal Batak umumnya berada di *Giyugun Sumatra Timur* karena Tanah Batak termasuk wilayah Sumatra Timur. Akan tetapi, tidak semua perwira Batak tersebut bergabung dalam *Giyugun Sumatra Timur*, misalnya, Maluddin Simbolon bergabung dalam *Giyugun Sumatra Selatan*, tepatnya Bengkulu. Salim Batubara juga masuk di *Giyugun Sumatra Selatan*, di Karesidenan Lampung. Syafei Siregar bergabung dalam *Giyugun Sumatra Barat* di Padang (Zed, 2005).

Setelah Indonesia merdeka, beberapa dari perwira eks-*Giyugun* turut aktif dalam kemiliteran daerah. Mauluddin Simbolon dan Jamin Ginting pernah menjabat sebagai Komando Tentara Teritorium I Sumatra Utara (KO TT I/SU). Maludin Simbolon juga salah satu perwira yang menjadi pemimpin Pemberontakan PRRI di Sumatra, bersama Zulkifli Lubis, tentara eks-PETA.

Selain *Giyugun*, perwira Batak juga ada yang turut serta dalam Pembela Tanah Air (PETA) di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Zulkifli Lubis, yang dikenal sebagai Bapak Intelijen Negara, karena meletakkan dasar-dasar intelijen yang didapatkannya dari temannya perwira Jepang. Seperti yang telah disebut sebelumnya, Zulkifli Lubis juga turut aktif dalam Pemberontakan PRRI di Sumatra, dan memutuskan berhenti dari karier militernya setelah para pemberontak PRRI sudah “kembali ke pangkuan NKRI”.

Rivalitas para perwira Batak di panggung kekuasaan Masa Revolusi (1945—1950)

Pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno, lalu digantikan oleh Kabinet Hatta. Kabinet Hatta memiliki beberapa program, antara lain menyelenggarakan Persetujuan Renville, mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat, reorganisasi dan rasionalisasi, serta pembangunan atau rekonstruksi (Nasution, 1982).

Program tentang Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) ini berkaitan dengan organisasi tentara yang bertujuan mengurangi jumlah personel angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensi, dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah. Program ReRa ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan militer. Kolonel Maludin Simbolon, sebagai pemimpin Divisi-I Sumatra Selatan, menilai program ini lebih sulit diterapkan di wilayahnya dibandingkan dengan di Jawa. Bagaimanapun, Simbolon tidak benar-benar menentang kebijakan rasionalisasi itu. Sebagai pemimpin daerah, dirinya berusaha untuk mencari jalan keluar dalam mematuhi perintah dari pusat. Keuangan yang tidak mencukupi itu dapat teratasi berkat bantuan rakyat. Kemudian, dalam menyeleksi perwira yang terkena demobilisasi, Simbolon menerapkan persyaratan kesehatan. Jika kurang memenuhi persyaratan kesehatan, akan di demobilisasi.

Sementara itu, A.H. Nasution dan T.B. Simatupang pro terhadap kebijakan ini. A.H Nasution adalah perwira pertama yang menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi dan bekerja sama dengan Hatta dalam rasionalisasi itu. T.B Simatupang yang dekat dengan Sutan Syahrir juga setuju dengan perampingan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Perwira yang kontra menganggap rasionalisasi Hatta ini untuk menyingkirkan unsur-unsur anti pemerintahan di tubuh angkatan bersenjata. Namun, T.B. Simatupang dan A.H Nasution membela Hatta karena di samping penyingkiran tersebut, tujuan rasionalisasi Hatta direncanakan berdasarkan pertimbangan ekonomi (Kasenda, 2012).

Setelah adanya kebijakan tersebut, Indonesia harus menghadapi Belanda. Dalam menghadapi Belanda ini, Indonesia melakukan diplomasi, seperti Perjanjian Linggarjati. Akan tetapi, perjanjian tersebut menimbulkan perbedaan perspektif dan Belanda mulai menjalankan aksi militer yang berarti telah melanggar perjanjian. Berdasarkan pengalaman pada Agresi Militer I yang telah dilancarkan Belanda sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati, para perwira—khususnya perwira

Batak—telah melihat tanda-tanda akan terjadi lagi Agresi Militer yang dilaksanakan Belanda. Oleh karena itu, Markas Besar Tentara di Yogyakarta menyusun pedoman umum melakukan perang gerilya, yang mempunyai motto: di mana Belanda berada kita ganggu, di mana Belanda tidak ada kita berkuasa.

Dalam Dewan Siasat Militer di Yogyakarta, diputuskan apabila Belanda menyerang dan ibu kota RI (Yogyakarta) tidak dapat dipertahankan, seluruh pimpinan sipil maupun militer bersama-sama meninggalkan ibu kota dan masuk ke desa berbaur dengan rakyat. Sebagai seorang intelijen, Zulkifli Lubis bersama pasukannya yang cukup handal, memata-matai segala gerak-gerik militer Belanda. Dari hasil kegiatan inteligennya tersebut, Zulkifli Lubis dan pasukan menyimpulkan bahwa Belanda sebentar lagi akan menyerbu ibu kota. Zulkifli Lubis pun selalu melaporkan hasil monitoringnya kepada pihak yang berwenang, termasuk A.H. Nasution, perwira berdarah Batak yang menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD). Bahkan, laporan disampaikan setiap hari ketika situasi sudah semakin panas, agar semua pihak dapat mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan (Kasenda, 2012).

Dugaan Zulkifli Lubis tepat. Pada tanggal 19 Desember 1948 pagi hari, Belanda melakukan serangan besar-besaran di Jawa. Zulkifli Lubis bergegas ke Markas Besar Komando Djawa (MBKD), namun markas nyaris kosong. Ternyata, pejabat sipil memutuskan untuk tidak keluar kota. Hatta mengemukakan alasannya, baik di luar kota maupun di istana, Belanda akan terus mengejar para pejabat dan mereka akan tetap tertawan. Oleh karena itu, pejabat sipil memutuskan untuk tetap diam di istana (Simatupang, 1980).

Zulkifli Lubis kecewa akan tindakan pemerintah karena bertentangan dengan hasil rapat pada sidang Dewan Siasat Militer. Zulkifli Lubis kecewa dengan T.B. Simatupang, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf II Angkatan Perang. Menurutnya, seharusnya T.B. Simatupang yang menemui Soekarno di istana, dapat membujuk Soekarno untuk bergerilya. Di samping itu, Zulkifli Lubis juga kecewa dengan A.H. Nasution yang dianggap telah mengabaikan informasi yang diberikan kepadanya. Padahal, pertahanan Pulau Jawa berada dalam tanggung jawabnya sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD). Terlebih lagi, Zulkifli Lubis mengetahui bahwa dua hari sebelum serangan Belanda, yaitu tanggal 17 Desember 1948, A.H. Nasution pergi ke Jawa Timur dan meninggalkan ibu kota. Kekecewaan Zulkifli Lubis terhadap A.H. Nasution ini hingga membuat Zulkifli Lubis bertindak mengirim surat kepada Panglima Besar Sudirman, dan meminta supaya A.H. Nasution dipecat karena meninggalkan posnya (Yogyakarta) pada saat situasi genting. Tembusan ini juga dikirimkan kepada Nasution (Kasenda, 2012).

Masa Demokrasi Liberal (1950—1959)

Pada tahun 1950an, dalam tubuh TNI sendiri, sering terjadi berbagai masalah, baik berasal dari internal tubuh Angkatan Darat, maupun intervensi dari pihak luar. Terkait masalah internal tentara, M.C. Ricklefs berpendapat bahwa para panglima

tentara merasa tidak pasti akan peranan mereka sendiri dan dianggap kurang terpelajar jika dibandingkan dengan para politikus (Ricklefs, 2008).

Permasalahan bermula dari adanya Rencana Pembangunan Angkatan Darat yang bertujuan untuk membina Angkatan Darat menjadi tentara yang berdisiplin, maju, kuat, dan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Langkah pertama dalam mencapai tujuan tersebut adalah membina kualitas personelnya yang berarti akan diadakan demobilisasi (lagi) dalam tubuh Angkatan Darat yang diterapkan sebagai cara pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi negara yang defisit mencapai 9 miliar rupiah.

Rencana Pembangunan Angkatan Darat ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan para perwira—sama seperti kebijakan demobilisasi masa revolusi lalu. Kelompok yang kontra terdiri dari Kol. Bambang Supeno, Kol. Zulkifli Lubis, dan lain-lain yang disebut dengan “Blok Supeno-Lubis”. Kelompok ini umumnya berlatar pendidikan Jepang. Mereka menduga demobilisasi atau Rencana Pembangunan Angkatan Darat ini bertujuan untuk menyingkirkan perwira-perwira yang berlatar pendidikan Jepang, seperti PETA, *Giyugun*, dan lain-lain. Apalagi, perwira pendukung kebijakan itu berlatar pendidikan Belanda atau KNIL, seperti dua perwira Batak yang menjadi pimpinan militer—A.H. Nasution dan T.B. Simatupang. Selain itu, dalam penyaringan dalam tubuh TNI, ada tiga kriteria yang menjadi tolak ukur seorang perwira didemobilisasi atau tidak, antara lain tingkat pendidikan, kesehatan, dan usia. Dari tiga kriteria ini, perwira yang paling banyak didemobilisasi adalah perwira yang bukan lulusan Akademi Militer di Bandung masa kolonial Belanda, yaitu perwira asal Heiho maupun Peta atau *Giyugun*. Dari sini, Blok Supeno-Lubis beranggapan bahwa “Blok SUAD” yang terdiri dari A.H. Nasution, T.B. Simatupang, panglima tentara dan teritorium, dan perwira di SUAD, ingin mengembalikan pengaruh Barat ke dalam tubuh Angkatan Darat (Bangun, 1996).

Selain itu, dalam meningkatkan mutu profesionalitas perwira, direncanakan menggunakan Misi Militer Belanda (MMB) atau *Nederlandse Militaire Missie* (NMM) yang juga menimbulkan pro-kontra dalam tubuh perwira Angkatan Darat. Saat itu, semangat anti-Belanda masih sangat besar. Banyak perwira yang enggan menerima bekas lawannya dari KNIL maupun bekas pasukan-pasukan Belanda lainnya. Bagi Kol. Bambang Supeno, MMB terlalu berkuasa dan berlebihan dapat mengurangi rasa patriotisme para perwira.

Menurut Simatupang (1981), mereka yang pro—termasuk dirinya sendiri—ingin cepat menguasai sepenuhnya ilmu militer, meskipun harus dari bekas musuh. Sebab, para perwira yang pro terhadap MMB bertujuan untuk memajukan Angkatan Perang lebih cepat dan lebih sempurna agar dapat (setidaknya) setara dengan Angkatan Perang negara lain. T.B. Simatupang berpedoman pada kalimat, “Siapa yang tidak mau cepat maju akan tetap tinggal dalam kelas negara-negara terbelakang.” Lagipula, digunakan Misi Militer Belanda karena hampir tidak ada seorang pun dari perwira RI

yang telah memperoleh pendidikan penuh yang memadai untuk bertindak sebagai instruktur pada tingkat yang lebih tinggi (Sundhaussen, 1986).

Konflik antara Blok SUAD dengan Blok Supeno-Lubis memperlihatkan pula pertentangan antara perwira berlatar pendidikan Belanda (KNIL) dengan perwira berlatar pendidikan Jepang (PETA atau *Giyugun*). Perbedaan pendidikan yang didapat para perwira militer ini memang menjadi salah satu pemicu konflik di antara perwira TNI AD. Menurut Britton (1996), perbedaan pendidikan tersebut menyebabkan perbedaan profesionalisme tentara pada awal pembentukannya. Keduanya memiliki keterampilan dan pandangan yang berbeda terkait militer. Profesionalisme Barat yang didapat dari pendidikan militer Belanda memegang teguh bahwa para perwira adalah ahli-ahli dan sudah sewajarnya militer mengabdikan pada pemerintahan sipil. Pandangan ini tentu sejalan dengan para cendekiawan sipil dan para politisi yang pandangan politiknya berorientasi pada gagasan demokrasi liberal—yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950—1959. Sementara perwira yang mendapat pendidikan dari Jepang berpandangan bahwa perwira berkewajiban menjadi pemimpin yang berani, yang kedudukannya tergantung pada penilaian bawahannya. Perwira eks-pendidikan Jepang juga berpandangan bahwa satu pasukan dari orang-orang terlatih dan penuh pengabdian dapat mengatasi teknologi unggul lewat tekad dan agresi.

Di sisi lain, Maludin Simbolon yang berlatar pendidikan Jepang (*Giyugun* di Sumatra), mendukung kebijakan rencana tersebut. Sebagai perwira bekas *Giyugun*, dirinya menyadari bahwa pendidikan militer yang diterimanya dari Jepang kurang terkait hal-hal pengetahuan teknis kemiliteran. Dalam daerah komandonya, Simbolon memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tenaga dari Misi Militer Belanda untuk meningkatkan personelnya (Bangun, 1996).

Konflik-konflik yang terjadi dalam tubuh TNI Angkatan Darat berusaha diselesaikan oleh parlemen yang kemudian dibawa ke sidang parlemen pada 28 Juli 1952, dan memunculkan tiga mosi, yakni mosi Zainul Baharuddin dan Ir. Sakirman (PKI), mosi I.J. Kasimo (Katolik) dan M. Natsir (Masyumi), dan mosi Manai Sophiaan. Akan tetapi, bukannya memperbaiki konflik dalam tubuh Angkatan Darat, Mosi Manai Sophiaan yang mendapat suara terbanyak malah makin memperkeruh konflik dalam tubuh militer, bahkan juga antara perwira dengan parlemen. Para perwira ini pun melakukan demonstrasi dengan tuntutan bubarkan parlemen dan percepat pemilu. Kemudian, mereka bertemu dengan pemerintah pusat, yang hasilnya Soekarno tetap tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut karena tidak mau menjadi diktator.

Di samping itu, Zulkifli Lubis yang saat itu menjabat sebagai Kepala Intel Biro Informasi Perang, kontra terhadap Peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam hal ini, Zulkifli Lubis berpihak kepada Soekarno. Rencana para perwira yang akan berdemonstrasi pada 17 Oktober 1952 sudah diketahui oleh Zulkifli Lubis dan berusaha dihentikan tetapi gagal (Kasenda, 2012).

Dari sini terlihat jelas konflik langsung dari perwira Batak, antara Zulkifli Lubis dengan A.H. Nasution yang didukung oleh T.B. Simatupang dan Maludin Simbolon.

Dalam suasana kegaduhan akibat peristiwa tersebut, Zulkifli Lubis, sebagai seorang intel, tentu tidak bisa tinggal diam dan mengeluarkan laporan terkait Peristiwa 17 Oktober 1952 yang dikenal sebagai Laporan Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP), atau A.H. Nasution menyebutnya dengan dokumen Lubis. Dirinya merasa harus membuat laporan tertulis mengenai peristiwa tersebut (Kasenda, 2012). Isi laporannya menyatakan bahwa Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan suatu "*coup d'état*". Lubis dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa inti dari pembicaraan antara presiden dan KSAD A.H. Nasution adalah mencoba untuk mengubah struktur demokrasi menjadi pemerintahan diktatorial yang mengalihkan kekuasaan penuh kepada Panglima Tertinggi (*militaire dictator*). Namun, tulis Lubis, percobaan tersebut gagal karena Presiden Soekarno memegang teguh Pancasila (Nasution, 2013).

Laporan BISAP atau dokumen Lubis tentu dibantah oleh A.H. Nasution. Dirinya menyatakan bahwa bagian-bagian penting dari isi dokumen tersebut hanyalah fitnah. Apalagi, saat itu, Zulkifli Lubis tidak berada di sana. SUAD pun mengeluarkan bantahan pada akhir November 1952 dengan menyatakan bahwa konsep dan dialog yang tertera pada laporan BISAP tersebut tidak benar adanya (Kasenda, 2012).

Akibat peristiwa tersebut, A.H. Nasution dan T.B. Simatupang sebagai perwira yang terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, dicopot dari jabatannya. Bahkan, jabatan T.B. Simatupang dihapuskan dan tidak memungkinkan dipindahkan ke jabatan lain karena KSAP merupakan jabatan tinggi. Namun, pada tahun 1955, A.H. Nasution akhirnya dipilih kembali untuk menjadi KSAD kedua kalinya. Sementara jabatan WKSAD diduduki Zulkifli Lubis. Kedudukan dua jabatan pimpinan Angkatan Darat yang sama-sama berasal dari Batak ini bagi Nasution tidak menunjukkan demokrasi. Bagaimanapun, kedua perwira tersebut ternyata banyak perbedaan yang menimbulkan banyak konflik di kalangan perwira.

Konflik antar perwira makin memanas ketika Nasution melakukan mutasi untuk perwira senior. Nasution bertujuan untuk memberikan pengalaman dan latihan kepada perwira-perwira senior. Mutasi ini melibatkan banyak perwira senior dari berbagai jabatan dan teritorium. Perwira Batak senior yang ada dalam rencana Nasution adalah Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon. Dalam rencana Nasution, Gatot Subroto akan menjadi WKSAD menggantikan Zulkifli Lubis. Sementara Zulkifli Lubis akan menggantikan Simbolon dalam jabatan Panglima Tentara dan Teritorium I (Sumatra Utara). Sementara itu, Simbolon akan diperbantukan kepada KSAD untuk tugas-tugas khusus.

Sebelum mutasi tersebut terlaksana, terjadi suatu insiden yang dijalankan WKSAD Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang. Pada tanggal 13 Agustus 1956, Roeslan Abdul Gani sebagai Menteri Luar Negeri ditahan oleh Lubis dan Kawilarang dengan tuduhan terlibat dalam korupsi yang dilakukan oleh Lie Hot Thay (Wakil Direktur Percetakan Negara). Penahanan ini dilakukan tanpa sepengetahuan KSAD Nasution yang kemudian Roeslan dibebaskan. Akibat tindakan KSAD Nasution yang meloloskan Roeslan ini, Zulkifli Lubis menyatakan bahwa Perdana Menteri Ali

Sastroamidjojo dan KSAD Nasution telah membantu dan melindungi kejahatan (Sundhaussen, 1986).

Pada awal September, tersiar kabar bahwa tindakan Lubis dan Kawilarang yang disebut Nasution sebagai “perbuatan koboi” ini berencana akan menggantikan Nasution dan menggulingkan Kabinet yang akan diganti dengan kabinet baru di bawah pengawasan suatu dewan militer (Muhaimin, 1982). Ternyata, kabar tersebut benar adanya. Konflik perwira Batak antara Nasution dengan Lubis yang didukung Simbolon makin berlarut-larut. Mereka telah sepakat bahwa Kemal Idris akan memimpin semua gerakan militer, sementara Zulkifli Lubis dengan bantuan Djuchro akan mencetuskan kerusuhan rakyat di Jakarta untuk menggerakkan pasukan mereka dan menjatuhkan kabinet dan Nasution.

Nasution yang mendengar rencana tersebut langsung membentuk panitia *ad hoc* untuk menyelidiki keterlibatan Zulkifli Lubis sampai dengan beberapa komandan batalion. Gerakan kudeta yang kemudian disebut Nasution sebagai Peristiwa Lubis atau Lubis Affair (Sundhaussen, 1986), dan disebut Rosihan Anwar sebagai Gerakan Anti-Nasution, mulai bergerak pada tanggal 11 Oktober 1956. Namun, ketika pasukan Lubis telah sampai di Bekasi, mereka malah mundur ke Bandung karena dicegat oleh pasukan Nasution. Menurut Rosihan Anwar, gerakan ini gagal akibat miskomunikasi dan RPKAD bergerak tanpa koordinasi (Anwar et al., 1997). Ulf Sundhaussen mengatakan bahwa setidaknya ada tiga penyebab kegagalan kudeta tersebut. *Pertama*, organisasi yang buruk dan ketiadaan koordinasi di antara pemimpinnya. *Kedua*, Kemal Idris dan Suwanto dipecat dari jabatannya menyebabkan kelompok Lubis kehilangan kekuatan utamanya. *Ketiga*, tindakan Soekendro berhasil menggagalkan upaya kudeta tersebut, dan kelompok Lubis dianggap tidak memiliki konsep politik yang jelas (Sundhaussen, 1986).

Pergolakan dalam tubuh militer di Jakarta belum sepenuhnya usai, muncul lagi pergolakan dari luar Pulau Jawa, yang juga berasal dari para perwira daerah. Banyak penyebab pergolakan ini terjadi. *Pertama*, sejak tahun 1950, daerah luar Pulau Jawa sudah kecewa terhadap pemerintah pusat yang menganakemaskan Pulau Jawa. Mereka menganggap Jawa (pemerintah pusat) *menjajah* luar Pulau Jawa. *Kedua*, pembangunan tidak berjalan di daerah-daerah, padahal daerah luar Jawa merupakan penghasil devisa terbesar. *Ketiga*, komunis yang makin kuat kedudukannya dikhawatirkan akan menggantikan pancasila. Umumnya, para perwira tidak setuju dengan keberadaan komunis akibat memiliki pengalaman pahit dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Akan tetapi, Soekarno dalam konsepsi terbarunya yang disebut Demokrasi Terpimpin malah mengikutsertakan komunis (Leirissa, 1991; Sundhaussen, 1986).

Kemudian, kondisi ekonomi yang kurang baik tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan para perwira. Tindakan pemerintah yang membuat prosedur yang berbelit-belit, penyalahgunaan sumber devisa, serta pemberian izin istimewa kepada anggota partai penyokongnya, mengakibatkan dana operasi militer terganggu. Apalagi,

gaji prajurit minim dan asrama prajurit merupakan bekas asrama tentara Belanda atau tempat lainnya yang kurang memadai (Leirissa, 1991).

Masalah minimnya asrama prajurit terasa di teritorium Maludin Simbolon TT/I dan telah berkali-kali diajukan olehnya kepada pimpinan TNI-AD dan Menteri Pertahanan di Jakarta, tetapi nihil dan selalu mengatakan tidak ada dana cukup untuk hal tersebut. Balasan pemerintah ini membuat Simbolon nekad untuk mencari dana sendiri dalam memenuhi kesejahteraan prajurit di wilayahnya, karena baginya, kesejahteraan prajurit adalah yang utama. Simbolon dan para panglima daerah lain mulai mencari dana dengan mengeksport sendiri hasil produksi pertanian lokal tanpa melalui prosedur administrasi di Jakarta. Pemerintah pusat menyebut cara ini dengan *barter*, sebagai pengganti istilah penyelundupan (Leirissa, 1991).

Namun, pada tahun 1956, kegiatan ini terhenti ketika ada pers Ibu Kota memberitakan adanya *Penyelundupan di Teluk Nibung*. KSAD A.H. Nasution yang didesak oleh Kabinet Ali II pun terpaksa memerintahkan penghentian kegiatan tersebut. Simbolon diperiksa dan dipanggil menghadap Kejaksaan Agung, namun dianggap selesai karena seluruh administrasi pembukuannya sangat lengkap dan rapi. Lagi pula, sesuai dengan tujuannya, hasil dari perdagangan atau *operasi* tersebut berhasil digunakan untuk membangun asrama-asrama tentara, setahap demi setahap (Bangun, 1996).

Kekecewaan para pemimpin daerah di Sumatra dibicarakan di kalangan militer pada pertemuan bekas anggota Divisi Banteng di Sumatra Barat pada November 1956. Di Medan, terdapat pula perundingan yang menghasilkan kesepakatan yang disebut *Ide 4 Desember*. Sebenarnya, sejak Agustus 1956, Simbolon sudah harus menyerahkan tongkat komandonya di Medan, sesuai dengan penetapan KSAD. Oleh karena itu, peranannya dalam *Ide 4 Desember* merupakan pembangkangan langsung darinya (Leirissa, 1991). Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1956, Simbolon membentuk Dewan Gajah di Medan. Pada hari yang sama, Simbolon menyatakan bahwa Sumatra Utara memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta, hingga terbentuk kabinet yang berisi orang-orang yang jujur dan mempunyai integritas. Tindakan ini dilakukan Simbolon atas desakan Lubis agar memutuskan segala ikatan dengan pemerintah pusat dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil (Muhaimin, 1982). Simbolon menegaskan bahwa Sumatra Utara tidak memutuskan hubungan dengan Soekarno, melainkan kabinet pemerintah. Kemudian, pemerintahan di Sumatra Utara dijalankan oleh Dewan Revolusi yang dipimpin Simbolon sendiri, sementara Dewan Gajah dipimpin oleh Letnan Kolonel Djamin Gintings yang merangkap sebagai Gubernur Militer (Bangun, 1996).

Pemerintah dan pimpinan Angkatan Darat menganggap bahwa tindakan Simbolon telah melanggar doktrin TNI, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Pada hari yang sama, tanggal 22 Desember 1956, Kolonel Maludin Simbolon diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Panglima TT-1. Sebagai gantinya, pemerintah memiliki dua calon, yakni Letnan Kolonel Djamin Gintings dan Letnan Kolonel A. Wahab.

Letnan Kolonel Djamin Gintings dipilih karena dianggap pemerintah akan mendapat dukungan dari unsur-unsur anti-Toba yang saat itu sangat besar di Sumatra Utara. Alternatif lainnya dipilih Letnan Kolonel A. Wahab hanya sebagai *pancingan* agar Letnan Kolonel Djamin Gintings menerima tawaran tersebut.

Letnan Kolonel Djamin Gintings sangat dilema menghadapi tawaran tersebut. Sebenarnya, bagi Djamin Gintings, tindakan Simbolon yang memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat sudah melewati batas. Menurutnya, Ikrar Bersama hanya terkait pembangunan daerah dan perbaikan kesejahteraan, sementara tindakan Simbolon sudah melewati wewenang Ikrar Bersama. Pada akhirnya, setelah terjadi pengambilalihan jabatan panglima oleh Letkol A. Wahab, Djamin Gintings memutuskan menerima tawaran tersebut. Letnan Kolonel Djamin Gintings pun menyatakan bahwa tindakannya dalam melaksanakan keputusan Pemerintah Pusat bukan sebagai pengingkaran terhadap Ikrar Bersama.

Melihat Medan dalam ancaman pecahnya “perang saudara”, Simbolon pun memutuskan menghindari dari Medan dan menuju Tapanuli, dan akan menjadi tempat tinggal sementara. Simbolon berharap tidak akan ada pertumpahan darah jika dirinya menyingkir ke Tapanuli (Bangun, 1996). Dengan demikian, keputusan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah di Sumatra Utara ini hanya membuat masalah makin pelik.

Akibat banyaknya masalah pada masa itu, Kabinet Ali II pun mengundurkan diri dan digantikan dengan Kabinet Djuanda. Djuanda pun langsung membentuk Musyawarah Nasional (Munas) untuk mempertemukan semua pendapat dan menghilangkan perbedaan. Musyawarah ini diadakan di Jakarta tanggal 10–15 September 1957. Wakil dari Sumatra Utara antara lain Letkol Djamin Gintings, A. Lubis (ketua DPRD Sumut), Sutan Kumala Pontas (Gubernur Sumut), dan Mayor Sahala P. Hutabarat (Komandan Resimen 3 dari Tapanuli), tidak ada Simbolon dan Lubis. Sebelum pertemuan Munas, diadakan pertemuan terlebih dahulu di Palembang yang menghasilkan Piagam Palembang. Perwira yang hadir diantaranya Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Ahmad Husein, Letnan Kolonel Barlian, dan Letnan Kolonel Ventje Sumual.

Seminggu setelah Munas, diadakan lagi pertemuan rahasia di Padang yang dihadiri oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Letnan Kolonel Dachlan Djambek, Letnan Kolonel Barlian, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Mereka membicarakan bahwa Munas seolah-olah berhasil menampung masalah pembangunan daerah, tetapi sebenarnya mengesampingkan masalah-masalah penting, seperti bahaya komunisme, penggantian KSAD, dan perimbangan dana daerah (Kasenda, 2012). Satu-satunya hasil yang dicapai Munas adalah pembentukan Panitia Tujuh untuk mengawasi pertikaian dalam tubuh Angkatan Darat yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Djuanda, Leimena, Hamengku Buwono IX, A.H. Nasution, dan Azis Saleh. Setidak-tidaknya, mereka yang hadir dalam Munas telah sepakat untuk menyelesaikan masalah

berlandaskan keutuhan Dwitunggal, Undang-undang Dasar Sementara, dan Piagam Yogya.

Namun, terjadinya percobaan pembunuhan terhadap Presiden di Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957 menyebabkan pemerintah membekukan semua hasil Musyawarah Nasional. Selain itu, Peristiwa Cikini ini malah membuat pemerintah pusat mendiskreditkan tokoh-tokoh daerah yang bergolak terlibat dalam peristiwa tersebut. Bahkan, Nasution menuduh Lubis sebagai dalangnya. Lubis sendiri mengakui bahwa sangat keliru jika dirinya terlibat dalam Peristiwa Cikini. Tersangkut boleh saja, karena Lubis memang kenal dengan orang-orangnya, tetapi salah jika dituduh bahwa Lubis menyuruh mereka melakukan itu (Endarmoko, 1993)

Akibat tindakan pemerintah yang membekukan hasil Musyawarah Nasional dianggap oleh tokoh daerah bahwa pemerintah telah meninggalkan jalan damai dan diperkirakan akan menempuh jalan kekerasan. Sepanjang bulan Januari 1958, tokoh daerah mengadakan pertemuan yang tidak terputus mengenai jalan yang ditempuh menghadapi pemerintah pusat. Pertemuan ini diadakan di Sungai Dareh yang dihadiri Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Letnan Kolonel Barlian, Letnan Kolonel Ventje Sumual, Kolonel Maludin Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Moh. Natsir, Mr. Syafrudin Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap. Pertemuan tersebut belum sampai pada pembicaraan mengenai pembentukan pemerintahan tandingan, apalagi mengubah struktur negara. Pertemuan tersebut mendapat kesimpulan bahwa solusi dalam mengatasi krisis tersebut adalah dibentuk zaken kabinet yang dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, menggantikan Kabinet Djuanda. Kemudian, pada 10 Februari 1958, Dewan Perjuangan di Sumatra mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat.

Dalam menghadapi ultimatum tersebut, pemerintah membebastugaskan Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Maludin Simbolon, dan Kolonel Dahlan Djambek dari dinas tentara tidak dengan hormat sekaligus serta menangkap keempat perwira itu pada 11 Februari 1958. Lagi-lagi, tindakan pemerintah pusat membuat kemarahan daerah makin memuncak. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein di Bukittinggi mengumumkan dibentuknya Pemerintah Revolusioner RI (PRRI). Lalu, bentrokan senjata antara pemerintah pusat dan PRRI tidak terelakan lagi.

Akibat kedudukan pejuang PRRI terpisah-pisah dan berjauhan, sehingga komunikasi mereka pun tidak lancar ketika ada rencana penting. Pada akhirnya, tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan pasukannya menyerahkan diri. Perwira lain serta pasukannya juga mengikuti jejak Ahmad Hussein untuk menyerahkan diri. Simbolon membaca laporan umum dalam upacara kembali ke pangkuan Republik Indonesia di Balige pada 12 Agustus 1961, sementara Zulkifli Lubis menyerah pada tanggal 18 Agustus 1961. Pemerintah menyebut menyerahnya kaum pemberontak ini dengan sebutan *kembali ke pangkuan RI*.

KESIMPULAN

Dalam hubungan perwira Batak dari masa Revolusi hingga Liberal ini, para perwira tersebut terlihat tidak terlalu memandang kesukuan dalam menjalani tugasnya sebagai perwira. Dari segi agama, perwira Batak yang Islam antara lain A.H. Nasution dan Zulkifli Lubis. Sementara perwira Batak yang non-Islam antara lain Maludin Simbolon, T.B. Simatupang, Djamin Gintings, dan Boyke Nainggolan. Berdasarkan agama para perwira tersebut, (lagi-lagi) adanya persamaan agama ini bukan berarti mereka selalu sejalan. Dari segi pendidikan militer, para perwira Batak juga memiliki perbedaan. Sebagaimana perwira lain, para perwira Batak ada yang berlatar belakang pendidikan militer Belanda (KNIL) dan ada yang Jepang (PETA atau *Giyugun*). Perwira Batak lulusan akademi militer Belanda (KNIL) adalah A.H. Nasution dan T.B. Simatupang. Perwira Batak eks-*Giyugun* Sumatra adalah Djamin Gintings, Maludin Simbolon, dan Boyke Nainggolan. Sementara Zulkifli Lubis adalah lulusan PETA di Jawa. Dari uraian tersebut pun menunjukkan bahwa para perwira Batak mengutamakan idealismenya dibandingkan kekerabatan sukunya. Ajaran *Sisia-sia Na Lima* (Pengajaran Nan Lima) yang terdiri dari *Mardebata* (ber-Tuhan), *Martutur* (menjunjung tinggi kekerabatan), *Marpatik* (menjalankan aturan), *Maruhum* (menghormati hukum), dan *Maradat* (menjunjung tinggi adat) sudah tidak terlalu melekat pada perwira Batak masa itu. Akan tetapi, karakter Batak yang kerja keras, energetis, dan ambisius masih sangat melekat dalam diri perwira Batak yang ditunjukkan dari pemikiran, tindakan, ataupun perannya dalam peristiwa-peristiwa tahun 1945—1959.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, R., H. R. K., Rizal, R., & Madjid, D. (1997). *Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Bangun, P. (1996). *Kolonel Maludin Simbolon: Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Britton, P. (1996). *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia Perspektif Tradisi-tradisi Jawa dan Barat*. LP3ES.
- Endarmoko, E. (Ed.). (1993). *Memoar: Senarai Kiprah Sejarah*. Pustaka Utama Grafiti.
- Kasenda, P. (2012). *Komandan Intelijen Pertama Indonesia Zulkifli Lubis: Kolonel Misterius di balik Pergolakan TNI AD*. Penerbit Buku Kompas.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Leirissa, R. Z. (1991). *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Pustaka Utama Grafiti.
- Muhaimin, Y. A. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Gajah Mada University Press.
- Nasution, A. H. (1982). *Memenuhi Panggilan Tugas. (Jilid 1: Kenangan Masa Muda)*. PT Gunung Agung.
- Nasution, A. H. (2013). *Peristiwa 17 Oktober 1952: Ketika "Moncong" Meriam Mengarah*

ke Istana. Penerbit Narasi.

Ricklefs, M. . (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta.

Simatupang, T. B. (1980). *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Penerbit Sinar Harapan.

Simatupang, T. B. (1981). *Pelopor dalam Perang Pelopor dalam Damai*. Sinar Harapan.

Sundhaussen, U. (1986). *Politik militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. LP3ES.

Zed, M. (2005). *Giyugun: Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Pustaka LP3ES.